

**PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
PREMIUM DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :Aldina Nurhayatul Fitri

Aldinanurhayatul34@gmail.com

Pembimbing :Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The purpose of this research is to find out how the supervision of the distribution of premium fuel oil (BBM) in the city of Pekanbaru and what are the inhibiting factors. This research was carried out in the Energy Resources Mineral Office Riau Province and SPBU in the Pekanbaru City. The theory used in this study is the theory of controlling by Hani Handoko, which sets the standard implementation (planning), the implementation of measuring activities, measuring the implementation of real real activities, comparing the implementation of activities with standars, and taking corrective actions if necessary. The study uses qualitative research with a descriptive approach using purposive sampling snowball sampling, and techniques obtained throught interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that, controlling carried out by the department of Energy and Mineral Resources of Riau Province carried out has gane well but not yet maximally. Obstacle factor include human resource, budget, and controlling coordination. It isi better to increase the intensity of supervision for the welfare of the welfare of the community in meeting the needs of premium fuel.

Keywords: Controlling, Distribution, Premium Fuel (BBM)

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu bentuk energi yang cukup mendasar bagi manusia pada saat ini. Seiring kemajuannya ilmu pengetahuan dan teknologi Bahan Bakar Minyak (BBM) berkembang menjadi kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategi bagi masyarakat baik kebutuhan rumah tangga, sektor industri maupun transportasi dan juga diperlukan untuk kelancaran perekonomian yang semakin meningkat.

Menurut Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, dijelaskan bahwa tentang jenis BBM tertentu, jenis BBM penugasan, dan jenis BBM umum.

Provinsi Riau memiliki potensi besar pada sumber daya alam yaitu dikenal sebagai penghasil minyak di Indonesia. Pengelolaan Sumber daya alam dilakukan, mengingat meningkatnya kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Riau yang digunakan oleh masyarakat, mulai dari rumah tangga, transportasi, industri (usaha mikro) dan pelayanan umum. Hal ini mengakibatkan pergerakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak stabil dan akan berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Khususnya permintaan akan keperluan Bahan Bakar Minyak (BBM) premium yang semakin meningkat namun belum bisa terpenuhi, dikarenakan belum tepatnya metode penyalurannya kepada masyarakat.

Terjadinya pembatasan kuota

bahan bakar premium di Provinsi Riau sedangkan jumlah kendaraan yang semakin banyak, yang akan memberikan dampak pada penurunan kuota di Kota Pekanbaru sedangkan permintaan premium di kalangan masyarakat semakin meningkat. Sebab harga premium lebih murah dibandingkan harga bahan bakar lainnya, seperti pertalite dan pertamax. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan bahan bakar premium dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 20 menyatakan bahwa:

1. Badan Pengatur menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan pada wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
2. Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin usaha niaga umum dan memiliki fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dari pemerintah daerah mengingat sering terjadinya masalah dilapangan yang menjadi keluhan masyarakat. Berikut fenomena yang penulis tetapkan yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk melanjutkan penelitian ini, yaitu sering terjadinya masalah kelangkaan atau kekosongan Bahan Bakar Premium, pelanggaran dan

penyelewengan dalam penyaluran BBM kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terkait dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PREMIUM DI KOTA PEKANBARU”**.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian yaitu :

1. Bagaimana Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium di Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang penghambat dalam melakukan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium di Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini untuk diberbagai pihak adalah:

1. Manfaat akademisnya adalah Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat selama menuntut ilmu di masa perkuliahan sebagai referensi kepustakaan di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Sebagai rujukan bagi kalangan peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama. Dan penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian khususnya di bidang Administrasi Publik, terutama untuk pengembangan teori manajemen dan pengawasan.

2. Manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi bagi pihak instansi terkait, khususnya terkait pihak yang melakukan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) premium di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau terhadap SPBU yang ada di Kota Pekanbaru.

2. KONSEP TEORI

2.1 Konsep Manajemen

Manajemen adalah sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain. Bawa pemimpin mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan sendiri. Sedangkan manajemen adalah pencapaian tujuan organisasional dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi sumber daya organisasional (Wibowo, 2014). Menurut Schermerhorn dalam (Wibowo, 2014), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan tujuan kinerja.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian ini menitik bertakan pada segi prosesnya yaitu POAC Stoner dalam (Efendi, 2015). Menurut Handoko (2015) pengertian manajemen yang dikemukakannya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Stoner yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan dimana anggota organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan (*goal*) organisasi.

1. Perencanaan

Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

2. *Organizing*

Pengorganisasian (*organizing*) adalah penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi; perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan; penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian; pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan,

dibagi dan dikoordinasikan Handoko, (2015).

3. *Actuating*

Actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

4. *Controlling*

Pengawasan dikenal dengan upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau Pemerintah telah seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau Pemerintahan.

2.2 Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan (Handoko, 2015). Menurut Robert J. Mockler dalam (Handoko, 2015) pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil

tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Pengawasan diperlukan tahapan-tahapan dalam melakukan pengawasan agar pengawasan tersebut dapat berjalan lancar. Tahap-tahap pengawasan menurut **Handoko (2015)** tersebut yaitu:

1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan). Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil. Tujuan, sasaran, kuota, target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, margin keuntungan, keselamatan kerja, sasaran produksi. Tiga bentuk standar yang umum yaitu:
 - a. Standar-standar fisik
 - b. Standar-standar moneter
 - c. Standar-standar waktu.
2. Pelaksanaan pengukuran kegiatan. Pelaksanaan dapat menggunakan beberapa pertanyaan, yaitu:
 - a. Berapa kali (how often), pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, bulanan.
 - b. Dalam bentuk apa (what form), pengukuran akan dilakukan misalnya melalui laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telepon.
 - c. Siapa (who) yang akan terlibat, manajer atau staf departemen

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu:

- a. Pengamatan (observasi).
- b. Laporan-laporan, baik lisan maupun tulisan.
- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi, pengujian (test) atau dengan mengambil sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar, tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap kritis dari pengawasan karena kegiatan ini berupa membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitasnya dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, yaitu mengubah standar, memperbaiki pelaksanaan, atau keduanya dilakukan secara bersamaan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian sehingga sebuah penelitian dapat dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Energi

Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut untuk mengetahui tentang pengawasan dalam penyaluran Bahan Bakar Premium kepada masyarakat di Kota Pekanbaru..

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* untuk masyarakat. Adapun informannya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau
2. Staff Bidang Energi dan Energi Terbarukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau
3. Pihak Pengelolaan SPBU / manager SPBU di Kota Pekanbaru
4. Masyarakat

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Data yang diperoleh langsung dari informan lapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobjektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada di lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung yang dapat menunjang objek yang diteliti, yang berupa:

1. Profil Kota Pekanbaru
2. Profil Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau
3. Profil tentang SPBU
4. Undang-Undang
5. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral
6. BPH (Badan Pengatur Hilir) migas
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau
8. Data Jumlah SPBU di Kota Pekanbaru
9. Literatur, Dokumen dan Skripsi

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pengawasan yang dilakukan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) premium kepada masyarakat di Kota Pekanbaru.

b. Wawancara (Interview)

Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan.

Adapun alat yang pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut :

1. Buku catatan
2. Kamera/Telepon Seluler
3. Recorder Telepon Seluler

c. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi, yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Ada empat tahapan model analisis menurut Miles dan Huberman antara lain sebagai berikut:

1. *Data collection* (pengumpulan data)

Pengumpulan data peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti adalah kegiatan dengan melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*), telepon atau media lainnya, maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok tertentu yang terdiri dari tiga sampai enam responden.

2. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data yang dilakukan peneliti adalah dengan menelaah data yang tersedia diberbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk

setiap kontak atau pertemuan dengan informan. Dalam merangkum data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan tersebut kegiatan yang tidak dapat dipisahkan ini disebut membuat abstraksi, yaitu membuat ringkasan yang inti, proses, dan persyaratan yang berasal dari responden tetap dijaga.

3. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data yang digunakan peneliti adalah dalam bentuk tabel. Seperti tabel angkatan kerja menurut pendidikan, tabel pengangguran terbuka menurut golongan umur, tabel jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan tabel jumlah tenaga kerja mandiri. Selain dalam bentuk tabel peneliti menggunakan penyajian data dalam bentuk peta, yaitu peta Kabupaten Kuantan Singingi.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium di Kota Pekanbaru

Pengawasan dikenal dengan upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau Pemerintah telah seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau Pemerintahan.

Agar lebih jelas mengenai pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) premium di Kota Pekanbaru maka peneliti menguraikan secara rinci beberapa indikatornya. Adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar Pelaksanaan (Pelaksanaan)

Menetapkan standar pelaksanaan pada pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) premium sebaiknya ketentuan yang telah ditetapkan dipahami oleh pengawas dan yang diawasi agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan efektif dan dapat mengevaluasi kegiatan untuk lebih baik kedepannya.

Melakukan pengawasan penyaluran bahan bakar premium di

Kota Pekanbaru Dinas Energi Sumber Daya Mineral menggunakan standar dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014, BPH Migas, Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan aturan-aturan tersebut yang menjadi patokan atau acuan dari dinas tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar premium. Pengawasan yang dilakukan terhadap penyaluran bahan bakar premium di Kota Pekanbaru untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Standar yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut yaitu mengenai penyaluran bahan bakar minyak yang dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota bahkan provinsi. Selanjutnya menjamin tentang ketersediaan Bahan Bakar Minyak di setiap daerah terutama di setiap badan usaha yang memiliki izin usaha di Kota Pekanbaru. Kemudian mengenai kelancaran penyaluran dan pemenuhan alokasi dari bahan bakar minyak. Standar-standar yang ada pada peraturan-peraturan tersebut yang menjadi patokan dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Kegiatan pengawasan yang dilakukan mengenai ketersediaan bahan bakar premium, dengan melihat jumlah kuota, dan melihat masalah-masalah yang terjadi yang dapat merugikan masyarakat. Namun kegiatan pengawasan belum berjalan secara efektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pengawasan yang dilakukan oleh

DESDM dalam penyaluran Bahan bakar premium.

2. Pelaksanaan Pengukuran Kegiatan

Fase kedua dalam melakukan pengawasan adalah tentang pelaksanaan pengukuran kegiatan. Hal yang dimaksud melihat tentang bagaimana pelaksanaan pengukuran kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM.

DESDM melakukan pelaksanaan pengawasan secara kondisional, sedangkan pengawasan tersebut harus dilakukan sekali sebulan. Kemudian hasilnya dari kegiatan pengawasan tersebut dibuat berbentuk laporan untuk ditindak lanjuti yang akan dilaporkan pada BPH Migas. Oleh karena itu masalah-masalah tentang penyaluran bahan bakar premium enggan untuk diatasi, mengingat SPBU tidak melaporkan masalah-masalah yang terjadi dilapangan, dan banyaknya jumlah SPBU di Kota Pekanbaru.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata

Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata pada pengawasan yang dilakukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral pada penyaluran Bahan Bakar Minyak premium di Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) dan berdasarkan laporan-laporan.

Pengukuran kegiatan pelaksanaan nyata dilakukan oleh DESDM dengan observasi (pengamatan) dan berupa laporan baik lisan, tulisan, atau melalui sosial media. Pengawasan yang dilakukan secara observasi dimana pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh DESDM untuk melihat masalah-masalah yang terjadi. Kemudian dengan kegiatan observasi ini kegiatan pengawasan dapat

dilakukan, apakah diharuskan dilakukan pengawasan atau tidak. Kemudian pengawasan yang tidak langsung yaitu dengan menerima laporan-laporan yang berupa tulisan atau dari sosial media.

4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar

Tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap kritis dari pengawasan karena kegiatan ini berupa membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

Premium merupakan bahan bakar yang diminati masyarakat, dan seringkali masyarakat mengeluh karena bahan bakar premium sering terjadi kelangkaan, terdapat di beberapa SPBU yang kosong. Bahkan antrian premium yang sangat panjang dan memenuhi badan jalan. Pengawasan terhadap pengalokasian premium harus ditingkatkan lagi, mengingat semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap premium tersebut. Sebab setiap aktivitas masyarakat lebih dominan menggunakan bahan bakar premium. Premium lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar lainnya, seperti pertalite, pertamax, solar, dll.

Masalah-masalah yang menjadi keluhan bagi masyarakat yang menjadi konsumen premium. Seringkali terjadi kehabisan premium yang meresahkan masyarakat, jika membeli pada pedagang eceran harganya lebih mahal. Sedangkan harga premium merupakan harga bahan bakar yang lebih murah dibandingkan bahan bakar lainnya. Kemudian seringkali terjadi antrean yang panjang yang dipenuhi oleh mobil-mobil mewah tahun tinggi

yang seharusnya tidak menggunakan premium.

Pengawasan pengalokasian bahan bakar premium yang dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau terhadap SPBU yang ada di Kota Pekanbaru secara keseluruhan telah dilakukan berdasarkan standar atau perencanaan yang telah ada. Dinas tersebut telah melakukan pengecekan langsung terhadap pengalokasian bahan bakar premium dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penyaluran bahan bakar premium. Namun masalah-masalah yang terjadi belum dapat teratasi mengingat besarnya Kota Pekanbaru dan jumlahnya SPBU yang banyak.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi

Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari kondisi standar (perencanaan) karena berbagai alasan sehingga menghasilkan keadaan yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan perusahaan mempunyai sistem memonitor kegiatan produksi atau proses. Pengambilan tindakan koreksi dapat dilakukan bila diperlukan. Pengambilan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Mengingat premium lebih diminati oleh masyarakat, sebab kendaraan lebih banyak menggunakan premium. Untuk diperlukan tindakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penyaluran bahan bakar premium.

Tindakan yang diambil berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Dinas Energi Sumber Daya Mineral

dan instansi yang terkait melakukan kegiatan Coffee-moning, dimana disana tempat melakukan pembahasan tentang permasalahan yang ada pada pengalokasian penyaluran bahan bakar premium. Kemudian tindakan yang diambil tersebut mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Bentuk tindakan koreksi yang dilakukan yaitu memperbaiki pelaksanaan lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai permasalahan yang terjadi. Koordinasi yang harus berjalan dengan baik antara pihak SPBU dengan pemerintah daerah. Karena kurangnya koordinasi yang terjadi antara pihak SPBU dengan pemerintah daerah sehingga masyarakat merasa resah terhadap kelangkaan dan stok pasokan premium abis. Dapat diketahui bahwa premium lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan bahan bakar pertalite, pertamax, dll. Harga premium lebih murah dibandingkan dengan harga bahan bakar lainnya. Bahkan masyarakat lebih memilih untuk mengantri dan mencari SPBU yang menjual premium. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik dari pihak SPBU dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah tersebut. Agar ketersediaan premium di Kota Pekanbaru menjadi lebih maksimal.

1.2 Faktor penghambat Dalam Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium di Kota Pekanbaru

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang berperan dalam merencanakan, mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang dilakukan.

Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam pengawasan penyaluran bahan bakar minyak premium di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pengawasan dapat terwujud dengan optimal apabila ketersediaan sumber daya manusia memadai dan kemampuan pemahaman yang baik dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Biaya atau Anggaran

Biaya/anggaran merupakan hal yang sangat penting dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap instansi dan apapun itu selalu berkaitan dengan dana. Dalam hal ini berbicara mengenai dana pengawasan penyaluran bahan bakar minyak di Kota Pekanbaru. Pada setiap pengawasan, dibutuhkan dana yang dapat menunjang kegiatan dari pengawasan tersebut.

Setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau membutuhkan dana untuk turun langsung ke lapangan untuk biaya makan, transportasi, sarana prasana, dan lainnya. Dana yang diturunkan pusat akan memberikan dampak pada kegiatan pengawasan, ditambah lagi turunnya anggaran dari pusat tidak jelas kapan turunnya.

3. Koordinasi Pengawasan

Koordinasi dalam pengawasan sangat diperlukan dalam sinkronisasinya antara kinerja actual dengan kinerja yang distandarkan. Koordinasi perlu dilakukan dalam setiap proses manajemen sebagai upaya mengintegrasikan upaya berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan. Kalau

langkah tersebut tidak dilakukan maka sangat sulit bagi para manajer untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama secara terpadu. Jelas bahwa pengawasan mengandung pengertian adanya penilaian-penilaian atas pelaksanaan kerja. Untuk dapat mencapai objektifitas dalam pengawasan tersebut disertai dalam pengawasan tersebut disertai adanya koordinasi yang sebaik-baiknya di dalam organisasi dengan demikian tujuan pengawasan mengenai sasarannya dengan tepat.

Koordinasi yang dilakukan dianggap lemah karena tidak semua badan usaha yang melaporkan masalah-masalah yang terjadi di Kota Pekanbaru. Koordinasi yang dilakukan Antara pihak yang melakukan pengawasan dengan pihak yang diawasi mengenai penyaluran bahan bakar premium. Sehingga pengawasan yang dilakukan kurang maksimal sehingga permasalahan yang ada kurang maksimal untuk ditangani mengingat jumlah SPBU di Kota Pekanbaru yang jumlahnya banyak.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan informan serta analisa peneliti dan semua indikator yang telah disajikan pada bab sebelumnya, mengenai pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) premium di Kota Pekanbaru maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka kesimpulan akhir yang dapat

peneliti ambil mengenai pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) premium di Kota Pekanbaru, yang terfokus pada pengalokasian penyaluran bahan bakar premium belum berjalan secara maksimal dan belum efektif dapat dilihat dari hasil penelitian penulis. Dalam penelitian ini, penulis melihat bagaimana pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (premium) di Kota Pekanbaru yang dilihat dari masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat, seperti belum terpenuhinya kebutuhan premium secara maksimal dan sering terjadi antrian dan kelangkaan premium di Kota Pekanbaru. Karena kurangnya pengawasan dan perhatian pemerintah terhadap ketersediaan bahan bakar premium di Kota Pekanbaru. Serta pengambilan tindakan koreksi yang dilakukan belum memberikan dampak pada perubahan tentang maksimalnya ketersediaan premium.

2. Dari hasil penelitian juga ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan penyaluran bahan bakar premium di Kota Pekanbaru yaitu:

1. Sumber Daya Manusia
2. Anggaran
3. Koordinasi pengawasan

5.2 Saran

Dari hasil penelitian mengenai Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) premium di Kota Pekanbaru penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DESDM lebih rutin lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pengalokasian penyaluran Bahan

Bakar premium dan dilakukan secara menyeluruh pada tiap-tiap SPBU, untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat. selain itu melakukan tindakan yang cepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan peraturan tentang sasaran dari bahan bakar premium untuk lebih diperjelas dan dipertegas, mengingat kuota bahan bakar premium terbatas dan ketersediaannya pada SPBU juga terbatas, tidak semua SPBU yang ada di Kota Pekanbaru ada pasokan premium.

2. Untuk mengatasi kendala dalam pengawasan maka pemerintah daerah lebih memperhatikan kembali tentang ketersediaan Sumber Daya Manusia, anggaran dan dibutuhkan koordinasi pengawasan dari petugas pengelolaan SPBU dengan pemerintah daerah. Sehingga masalah yang merugikan dan menjadi keluhan masyarakat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Busro, M. (2018). *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenada Media.
- Creswell. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Effendi, Usman. (2015). *Asas Manajemen Edisi*

- kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Handoko T. Hani. (2015). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu, SP. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Karyoto. (2016) . *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 2*. Jakarta: In Media
- Manullang. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gdjah Mada University Press
- Noor, Juliansyah. (2015) . *Penelitian Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Reksohadiprodjo, Sukanto. (2015) . *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE
- Sugiyono, Agustinus. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. (2018) . *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gaya Media
- Suriansyah, Muhaini. (2014) . *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Terry, George R. (2014) . *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo. (2014) . *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Karya Ilmiah**
- Astuti, (2015) *Analisis Bahan Tambah Kapur terhadap karakteristik RAP*. Tugas Akhir, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fenti Efendi. *Implementasi Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Tata Niaga Pengadaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak di kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis*. Jom UNRI.
- Fitrianingrum, E. D. (2015). Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(5), 1644-1655.
- Ika Kusuma Nugraheni, Muhammad Murviko Almahul Pratama. (2018). *Pengukuran Penggunaan Bahan Bakar Biofuel (Premium dan Bioetanol) terhadap Kinerja Mesin Bensin 4 TAK*. *Jurnal Elemen Vol. 1*.
- Isnaini. (2016). *Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Disperindag Kota Pekanbaru*. Universitas Riau.
- Nelpan Gustian Harahap. (2018). *Analisis Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Karimun Tahun 2013-2014*. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol.1*.
- Ni Komang Darmiati. (2016). *Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi*. *Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.5. No.3*.
- Stefanus Bonifasius Pasumah, Marlien Lopian, Daud Liando. (2018). *Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Industri PT.Stemar Jaya*. *Jurnal*

Jurusan Ilmu Pemerintah.
Voll. No.1.

Yohanes, E. (2018). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7(2), 55-64.

Dokumen:

Undang-undang Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, peendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 88 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Minyak Tertentu untuk Pengguna Tertentu.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM).